

## Pegiat Anti-Korupsi Harus Mau Diperiksa

**YOGYAKARTA** – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai sikap pegiat antikorupsi yang tidak ingin diperiksa adalah sikap tidak sportif. Seharusnya pegiat antikorupsi juga mau menjalani pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran atas apa yang dituduhkan.

“Kita selalu dengar pegiat antikorupsi mengatakan periksa, periksa, periksa terhadap orang lain. Tapi kalau menyangkut dirinya, apakah lalu mengatakan jangan diperiksa? Teman-teman pegiat antikorupsi jangan tiba-tiba takut diperiksa. Jika memang merasa tidak bersalah, jelaskan saat pemeriksaan. Jangan membuat publik (membuat opini),” ungkap JK kemarin.

Kepada wartawan usai acara peresmian Gedung Pascasarjana UMY dan JK School of Government di kampus setempat, JK menilai, semua pihak harus mengetahui benar apa arti dari kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu tindakan kejahatan yang dibuat-buat.

Tapi, sambung dia, jika ada fakta dan orang yang bersangkutan diperiksa, baginya itu bukan kriminalisasi. Jadi tidak adil jika pegiat antikorupsi enggan diperiksa.

Komentar JK tersebut dikemukakan saat menanggapi kunjungan tiga pegiat antikorupsi yang mendatangi kantor Sekretaris Negara pada Jumat (6/3). Ketiganya ialah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjajanto, dan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein.

Kedatangan ketiga tokoh antikorupsi tersebut bermaksud menagih janji Presiden Joko Widodo agar menghentikan kriminalisasi terhadap KPK dan pegiat antikorupsi.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Independen Syafii Maarif menyatakan timnya tetap bergerak mendukung KPK. Dukungan itu sebagai bentuk konsistensi tim independen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dukungan moral terus kami gerakan. Karena kondisinya sudah makin memprihatinkan. Kampus-kampus, profesor-profesor semua tiarap, inikan repot. KPK seakan makin dimusuhi. Karenanya kami bergerak terus, kami perluas jaringan,” ujar Syafii kemarin.

Kepada wartawan, dia menuturkan, tim independen tidak memberikan saran apapun terkait kondisi KPK terkini kepada presiden karena memang tidak dimintai saran. Dia juga menyatakan hanya ada delapan orang yang aktif pada timnya. Saat dibentuk Presiden Jokowi untuk menengahi konflik KPK-Polri, tim independen memang beranggotakan 9 orang. Namun mantan Kapolri Jenderal Sutanto yang juga ditunjuk menjadi anggota tidak pernah datang saat tim berunding.

● **ratih keswara**